

# **BAB I**

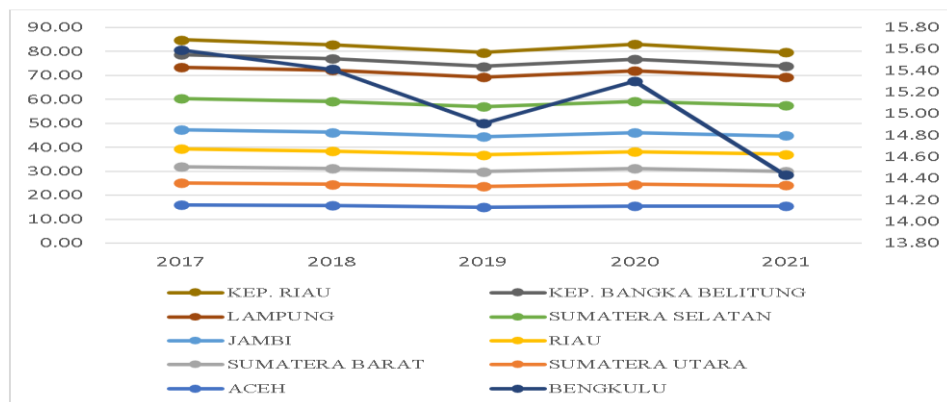
## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar ekonomi yang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Kemiskinan selalu timbul dengan masalah pengangguran dan kesenjangan dimana ketiganya saling terkait yang mana menyebabkan pembangunan di suatu wilayah menjadi terhambat. Permasalahan kemiskinan di Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya terselesaikan oleh pemerintah karena permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang mencakup multidimensional (Yusup, 2017). Teori Nurkse mengenai kemiskinan menyatakan bahwa tiga penyebab utama dalam kemiskinan adalah adanya keterbelakangan dan ketertinggalan Sumber Daya Manusia (SDM), yang tercerminkan dari rendahnya IPM, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas (Miftakhudin, 2020).

Pulau Sumatera adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah seperti hasil perkebunan dan pertambangannya, namun pada kenyataan tidak berbanding lurus dengan kondisi kesejahteraan masyarakatnya seperti grafik 1 di bawah ini. Pada tahun 2020 di Pulau Sumatera terdapat 6,1 juta penduduk miskin dengan persentase 9,82% artinya 22% dari total penduduk miskin di Indonesia berasal dari Pulau Sumatera (Badan Pusat Statistik, 2020). Hal tersebut terjadi karena sistem perekonomian di Pulau Sumatera masih bergantung pada pertanian dan pertambangan. Hal itu juga mencerminkan bagaimana Provinsi Bengkulu bisa menjadi provinsi termiskin kedua di Pulau Sumatera setelah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi roda utama penggerak perekonomian di Provinsi Bengkulu dan di beberapa provinsi lainnya.

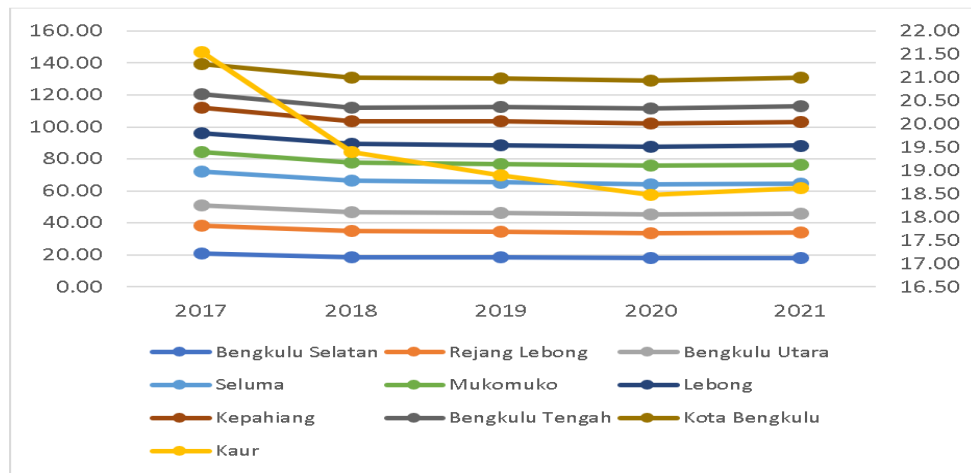
**Grafik 1. Persentase Kemiskinan di Pulau Sumatera**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu 2021

Grafik 1 di atas menunjukkan tingginya persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera yang disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang tercermin dari rata-rata lama sekolah sebesar 8,93 dan harapan lama sekolah yang hanya mencapai 13,21 serta jumlah pengangguran yang tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi rendah (Wulan Suri & Triyanto, 2019). Belum meratanya pembangunan di Pulau Sumatera juga membuat kemiskinan di beberapa daerah menjadi meningkat karena membuat masyarakat sulit memperoleh akses pendidikan dan pekerjaan. Program pemerintah yang kurang maksimal seperti BLT dan Bantuan Pangan non Tunai turut menjadi permasalahan karena tidak tepat sasaran akibat dari data yang kurang akurat di lapangan. Basis ekonomi yang masih dominan mengandalkan pertanian juga merupakan faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera begitu lambat karena sangat bergantung sekali pada hukum alam seperti masa panen. Ketika menunggu masa panen, banyak masyarakat yang menganggur karena minimnya pilihan dan lapangan pekerjaan. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera setelah Aceh yaitu mencapai 14,43% di tahun 2021, dimana angka tersebut melebihi tingkat kemiskinan Nasional yang hanya sebesar 9,71%.

**Grafik 2. Persentase Kemiskinan 10 Kab/Kota Provinsi Bengkulu 2017-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu 2021

Grafik 2 menunjukkan tingkat kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Bengkulu dimana pada tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi dengan tren meningkat. Kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Seluma sebesar 18,72% dan diikuti oleh Kabupaten Kaur sebesar 18,62%. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan angka kemiskinan 18,16%, Kota Bengkulu sebesar 17,89%, dan Kabupaten Rejang Lebong 15,85%. Ada pula Kabupaten Kepahiang dengan persentase penduduk miskin 14,83%. Berikutnya Kabupaten Lebong sebesar 12%, lalu Kabupaten Mukomuko 11,93%, serta Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah masing-masing sebesar 11,61% dan 9,68%.

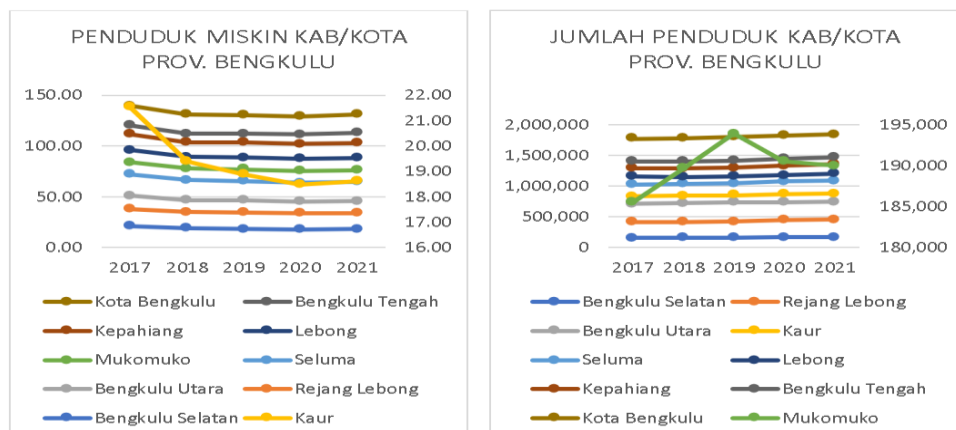
Tingginya kemiskinan di 10 Kab/Kota Provinsi Bengkulu terjadi karena kualitas SDM di wilayah tersebut bisa dibilang cukup rendah karena minimnya fasilitas dan pelayanan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Hal tersebut dapat dibuktikan karena terdapat 352 desa di 9 Kabupaten Bengkulu tidak memiliki sekolah dasar. Faktor alam juga tak luput menjadi salah satu penyebab kemiskinan ketika bencana alam seperti longsor dan banjir bandang seperti yang terjadi di Kota Bengkulu sebanyak 5 kecamatan mengalami banjir sebanyak 886 kk terpaksa mengungsi, ratusan hektar sawah terendam banjir yang

mengakibatkan gagal panen. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten seluma, Bengkulu Tengah, Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang dimana mengalami banjir, a angin kencang dan tanah longsong yang menyebabkan 652 kk terdampak serta 2 orang meninggal dunia. .

Pada tahun 2019 dan 2020 tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu sempat menurun yang kemudian pada tahun 2021 kembali naik, hal ini terjadi karena perekonomian Indonesia terhantam oleh pandemi covid-19 yang menyebabkan roda perekonomian menjadi melambat. Tidak hanya covid-19, pertumbuhan penduduk yang besar merupakan salah satu masalah yang menyebabkan jumlah kemiskinan di 10 Kab/Kota Provinsi Bengkulu tetap tinggi. Menurut Todaro, keterbelakangan kemiskinan disebabkan karena beberapa faktor yaitu jumlah penduduk dan angka kelahiran yang tinggi sehingga pertumbuhan angkatan kerja meningkat tajam (Todaro, 1993).

Bertambahnya jumlah penduduk akan mengakibatkan bertambahnya jumlah angkatan kerja pula sehingga apabila tidak diimbangi dengan kesempatan atau lapangan kerja yang ada maka akan menyebabkan pengangguran yang akhirnya berdampak pada kemiskinan (Dinas Tenaga Kerja, 2019).

**Grafik 3. Jumlah Penduduk 10 Kab/Kota Provinsi Bengkulu 2017-2021 (Dalam Ribu Jiwa)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu 2021

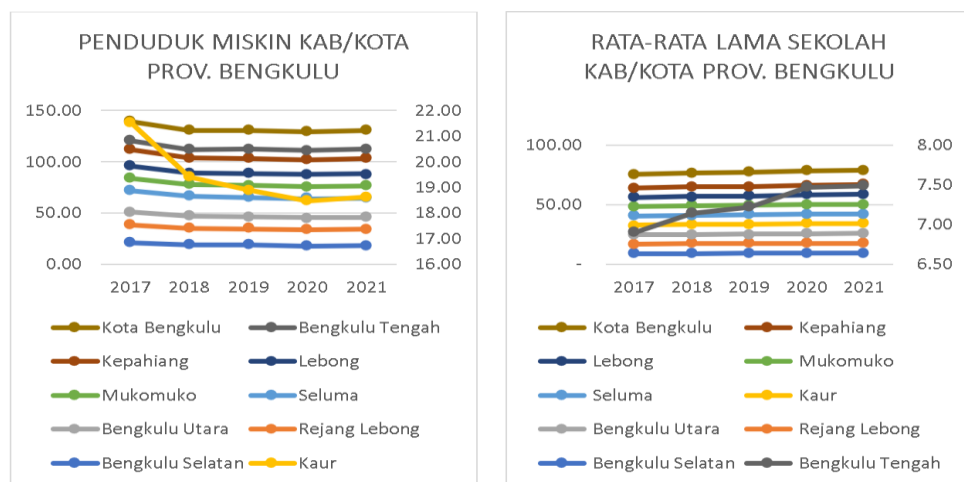
Pada grafik 3, Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2017-2021 relatif mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun untuk beberapa wilayah seperti Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Kota Bengkulu sempat terjadi penurunan jumlah penduduk ditahun 2020 dan 2021. Peningkatan dan penurunan jumlah penduduk di 10 Kab/Kota Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan alami yaitu dari faktor kelahiran, kematian, dan bencana alam. Pada tahun 2021 Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kota Bengkulu mencapai 373 ribu jiwa, kemudian diikuti dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan Rejang Lebong yang masing-masing sebesar 291 ribu jiwa dan 281 ribu jiwa Berikutnya ada Kabupaten Seluma dengan jumlah penduduk 213 ribu jiwa, Kabupaten Mukomuko sebanyak 189 ribu jiwa, Kabupaten Bengkulu Selatan 170 ribu jiwa, Kabupaten Kepahiang mencapai 152 ribu jiwa, Kabupaten Kaur 131 ribu jiwa, serta Kabupaten Bengkulu Tengah dan Lebong yang masing-masing 118 ribu jiwa dan 108 ribu jiwa. Pada tahun 2017-2019 di seluruh wilayah mengalami kenaikan jumlah penduduk namun angka kemiskinan mengalami penurunan, hal ini tidak sejalan dengan teori yang dikatakan oleh Todaro mengenai kemiskinan, dimana secara teori pertambahan jumlah penduduk merupakan faktor penghambat pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan kemiskinan dalam suatu wilayah.

Meskipun menurun, angka kemiskinan di 10 Kab/Kota Provinsi Bengkulu tetaplah tinggi. Dalam hal jumlah, Kota Bengkulu memang memiliki penduduk paling banyak, namun apabila kita lihat secara pertumbuhan penduduk Kabupaten Kaur dan Seluma memiliki pertumbuhan yang paling tinggi mencapai 3,8% dan 2,7% dibanding Kota Bengkulu yang hanya sebesar 0,2% ditahun 2021. Hal inilah yang menyebabkan kemiskinan di wilayah tersebut tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan angkatan kerja yang tinggi pula, apabila tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang ada maka akan menimbulkan pengangguran yang berdampak pada penurunan produktivitas sehingga kemiskinan akan bertambah. Selain itu juga, pemerataan program

bantuan sosial yang diselenggarakan pemerintah bagi masyarakat miskin menjadi terhambat dan tidak merata karena jumlah penduduk yang selalu meningkat tiap tahunnya sehingga data menjadi tidak akurat dan tidak sempurna yang akhirnya perlu pengecekan ulang ke lapangan agar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dapat tepat sasaran.

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam menunjang produktivitas demi keberlangsungan suatu pembangunan wilayah terutama di negara berkembang guna menekan angka kemiskinan, dengan pendidikan manusia akan memiliki keterampilan khusus guna menghasilkan output yang di inginkan (Todaro, 2000).

**Grafik 4. Tingkat Pendidikan 10 Kab/Kota Provinsi Bengkulu 2017-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu 2021

Berdasarkan grafik 4, terlihat bahwa tingkat pendidikan yang tercermin dari rata-rata lama sekolah di 10 Kab/Kota Provinsi Bengkulu selalu mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021. Meski meningkat, rata-rata lama sekolah 10 Kab/Kota Provinsi Bengkulu tergolong rendah karena hanya berkisar 8,6 tahun. Rata-rata lama sekolah terendah tahun 2021 terjadi pada Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu 7,5 tahun, kemudian diikuti oleh Kabupaten Seluma selama 8 tahun, Kabupaten Bengkulu Utaran 8,1 tahun, Kabupaten Lebong 8,2 tahun, Kabupaten Rejang Lebong, Mukomuko, Kepahiang yang masing-masing sama memiliki rata-rata lama sekolah yang sama selama 8,3 tahun. Selanjutnya ada Kabupaten Kaur 8,4

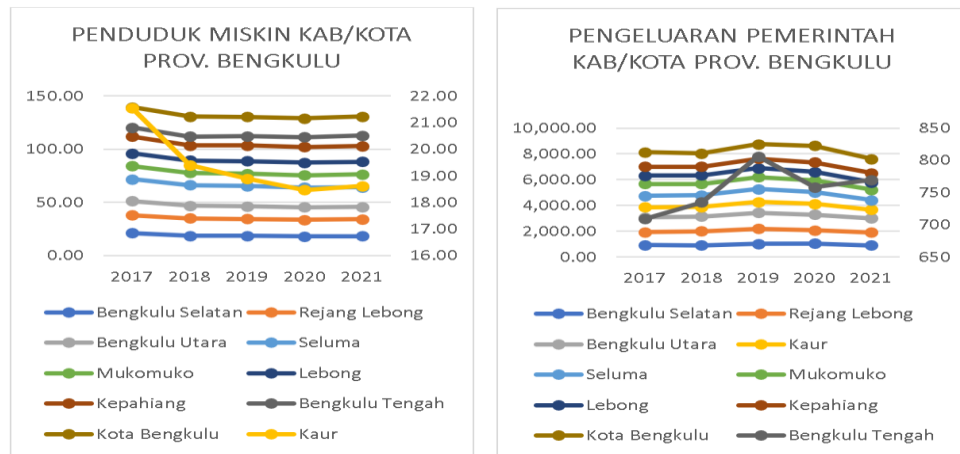
tahun, Kabupaten Bengkulu Selatan 9,3 tahun dan yang tertinggi adalah Kota Bengkulu mencapai 11,8 tahun. Rendahnya rata-rata lama sekolah di 10 Kab/Kota Provinsi Bengkulu disebabkan oleh minimnya fasilitas dan pelayanan pendidikan karena pembangunan infrastruktur disektor pendidikan belum merata hal ini dapat dilihat dari belum adanya sekolah dasar di 352 desa Kabupaten Bengkulu sehingga tidak heran apabila memperoleh akses pendidikan sangatlah sulit. Rendahnya akses terhadap pendidikan membuat kualitas SDM menjadi rendah yang akhirnya akan sulit untuk memperoleh pekerjaan kemudian berdampak pada penurunan pendapatan dan peningkatkan kemiskinan (Bernadette Nani Ariani & Arrafi Juliannisa, 2021).

Pada tahun 2018 jumlah keseluruhan sekolah negeri di 10 Kab/Kota Provinsi Bengkulu mencapai 1,886 sekolah negeri dan sekolah swasta sebanyak 197. Persebaran jumlah sekolah negeri di Provinsi Bengkulu ini tentunya masih belum merata dan masih terfokus di ibu kota. Hal ini yang membuat Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Mukomuko, Lebong, Kepahiang, dan Bengkulu Tengah memiliki rata-rata sekolah dibawah 9 tahun. Karena sulitnya memperoleh akses pendidikan, anak-anak didesa lebih memilih untuk bekerja membantu orang tuanya untuk memperoleh penghasilan dari hasil berkebun dan bertani.

Kota Bengkulu dengan tingkat rata-rata lama sekolah yang tinggi sebesar 11,70 justru memiliki rata-rata angka kemiskinan yang tinggi pula sebesar 18,3 selama periode 2017-2021 dimana nilai tersebut diatas tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,71, hal ini menjelaskan bahwa penduduk berpendidikan belum mampu terserap secara maksimal oleh lapangan pekerjaan yang ada di Kota Bengkulu (Agustina, 2018). Penelitian ini pernah di teliti oleh Agustina (2018) dan Juhar Monang S. Tambun & Rita Herawaty (2018) sejak tahun 2012 hingga 2018 mayoritas penduduk miskin berasal dari penduduk yang memiliki pendidikan tinggi. Kota Bengkulu juga tidak seperti kota-kota besar lainnya, karena masih banyak sekolah dengan pelayanan dan fasilitas yang minim serta kurangnya tenaga pendidik yang ahli dalam bidangnya masing-masing.

Pengeluaran Pemerintah merupakan suatu instrument kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang mana tujuan akhirnya mampu menekan angka kemiskinan disuatu wilayah (Rohadin, 2019).

**Grafik 5. Pengeluaran Pemerintah Daerah 10 Kab/Kota Provinsi Bengkulu 2017-2021 (Dalam Miliar Rupiah)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu 2021

Grafik 5 menunjukkan tingkat pengeluaran pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2017-2021 berfluktuasi dengan tren menurun. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020-2021 pandemi Covid-19 menyerang perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 menurun sebesar 2,39% dan tentunya hal ini juga yang menyebabkan penyerapan anggaran menjadi tidak maksimal karena penurunan output disetiap sektor terutama disektor pertanian dan perdagangan besar dan eceran (Badan Pusat Statistik, 2020). Rata-rata penurunan pengeluaran pemerintah tercatat mencapai 11,96% di sembilan wilayah, penurunan pengeluaran ini menyebabkan pembangunan infrastruktur dan pendidikan menjadi di alokasikan dan lebih difokuskan pada penanganan Covid-19. Pemerintah pusat maupun daerah mengalami defisit anggaran karena harus bekerja *extraordinary* dalam menangani masyarakat miskin akibat pengangguran yang disebabkan oleh Covid-19. Covid-19 menyebabkan pemutusan hubungan kerja dibanyak perusahaan

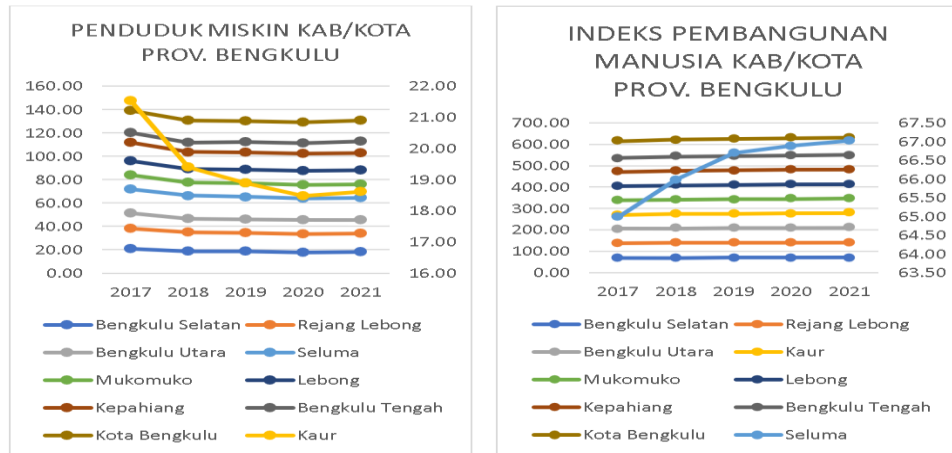


serta membuat pemerintah harus memberlakukan pembatasan sosial untuk menekan penyebaran Covid-19.

Kabupaten Seluma merupakan kabupaten dengan tingkat penurunan anggaran yang paling tinggi yaitu mencapai 19,8%. Hal tersebut disebabkan karena transfer pusat yang menurun yang sebabkan oleh Covid-19 serta relokasi anggaran untuk penanggulangan Covid-19 di seluma masih dalam tahap pembahasan yang belum *final*. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah lainnya seperti Kabupaten Kaur yang mengalami penurunan anggaran akibat refocusing dan relokasi mencapai 18%, Kabupaten Lebong 14,9%, Kota Bengkulu 14,6%, Kabupaten Bengkulu Selatan 12,7%, Kabupaten Bengkulu Utara 9,9%, Kabupaten Mukomuko 9,5%, Kabupaten Kepahiang 4,6% dan yang terakhir Kabupaten Rejang Lebong sebesar 3,6%. Penurunan pengeluaran pemerintah yang akhirnya tidak dapat menekan kemiskinan sehingga pada tahun 2021 kemiskinan di Provinsi Bengkulu meningkat sebesar 0,2%. Kabupaten Bengkulu Utara dengan pengeluaran pemerintah terbanyak yaitu mencapai 1100 miliar rupiah ditahun 2021 memiliki angka kemiskinan terendah kedua yaitu 11,61% berbeda dengan Kabupaten Kaur dengan pengeluaran yang jauh di bawah Kabupaten Bengkulu Utara memiliki angka kemiskinan yang besar yaitu 18,62%. Pengeluaran pemerintah mencerminkan bagaimana pemerintah daerah tersebut mengelolah keuangan untuk mendanai berbagai fasilitas publik agar kualitas SDMnya dapat meningkat dengan tercermin dari IPMnya.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan cerminan bagaimana tingkat kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah, semakin tinggi IPMnya maka kualitas hidupnya akan semakin baik yang akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Lestari, 2017).

**Grafik 6. IPM 10 Kab/Kota Provinsi Bengkulu 2017-2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu 2021

Grafik 6 menggambarkan bahwa IPM Provinsi Bengkulu selalu konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dimana IPM Provinsi Bengkulu berhasil tumbuh 0,7 lebih besar dibanding IPM nasional yang hanya 0,6. Meskipun meningkat, angka IPM 10 Kab/Kota Provinsi Bengkulu masih tergolong rendah dengan angka IPM terendah terdapat di Kabupaten Seluma yaitu 67,03, kemudian IPM terendah lainnya terdapat di Kabupaten Kaur sebesar 67,17, Kabupaten Lebong 67,46, Kabupaten Bengkulu Tengah 67,96, Kabupaten Kepahiang 68,62, Kabupaten Mukomuko 68,64, Kabupaten Bengkulu Utara 69,28, Kabupaten Bengkulu Selatan 70,75, Kabupaten Rejang Lebong 70,77 dan yang tertinggi adalah Kota Bengkulu dengan IPM mencapai 80,54. Hal ini juga yang menggambarkan bahwa pembangunan lebih terfokus di ibu kota. Peningkatan kualitas SDM cenderung lebih lambat di wilayah pedesaan seperti di 9 Kabupaten Provinsi Bengkulu yang mana kemiskinan di wilayah tersebut masih tinggi berada di dua digit.

Rendahnya IPM Kabupaten Seluma dan Kaur serta dengan wilayah lainnya merupakan bentuk akibat dari rendahnya pendidikan dan minimnya fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Ketimpangan sangat terlihat jelas ketika Kota Bengkulu merupakan satu-satunya wilayah dengan nilai IPM mencapai 80,54. Hal ini menandakan pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu masih tertinggal dari provinsi lainnya di pulau Sumatera yang

mengindikasikan bahwa belum meratanya pembangunan dan investasi publik dalam sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu. Peran pemerintah sangat penting dalam hal ini untuk mengatasi ketimpangan agar IPM yang berkualitas dapat tersebar di segala wilayah pada Kab/Kota di Provinsi Bengkulu dengan menunjukkan keberpihakan pada wilayah yang tertinggal. Fenomena mulai terlihat di tahun 2021 dimana pertumbuhan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Kota Bengkulu dengan IPM tertinggi tidak menjadi cerminan bahwa masyarakatnya berkualitas karena masih belum banyak terserapnya angkatan kerja dengan baik sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran yang akhirnya tingkat produktivitasnya menjadi rendah (Agustina, 2018).

Beberapa penelitian mencoba melihat Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah, dan IPM terhadap Kemiskinan dengan memfokuskan hubungan variabel-variabel tersebut dengan meningkatnya angka kemiskinan. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya adalah yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Meta Purmina Dewi (2020), Hakim (2019), Slamet Widodo (2018), Muhammad Yusup (2017) dan Wahyu Azizah et al., (2018) .Menyatakan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan berpengaruh baik secara positif maupun negatif terhadap variabel dependen, yaitu tingkat Kemiskinan. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukannya penelitian mendalam yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan penambahan literatur penelitian untuk mengurangi Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu. Dengan itu peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bengkulu”**.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Lima tahun belakangan ini permasalahan kemiskinan di Provinsi Bengkulu cukup memprihatinkan, hal ini dapat dilihat dari jumlah persentase penduduk miskin pada Pulau Sumatera di mana Bengkulu menempati posisi kedua dengan jumlah persentase penduduk miskin terbesar pada tahun 2020. Rendahnya kualitas SDM membuat tingkat produktivitas dan output (PDRB) sangat rendah. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Bengkulu?
2. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Bengkulu?
3. Apakah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Bengkulu?
4. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Bengkulu?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah, timbulah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Jumlah Penduduk) berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Bengkulu.
3. Untuk mengetahui apakah Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Bengkulu.
4. Untuk mengetahui apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Menambah pengetahuan mengenai jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu yang dapat dipengaruhi oleh faktor apa saja dan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh.

#### **b. Bagi Pemerintah Daerah**

Memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan mengenai upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu.

#### **c. Bagi mahasiswa dan masyarakat**

Sebagai bahan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian sejenis dan sebagai upaya untuk mendorong mahasiswa yang peka dan kritis terhadap kenyataan yang sedang terjadi saat ini serta ingin menumbuhkan kepedulian bagi masyarakat tentang adanya permasalahan yang dikalukan dalam penelitian ini.